

# Pengujian Batas Usia Capres-Cawapres

Atang Irawan Ahli hukum tata negara | Opini



MI/Duta  
Ilustrasi MI

PERHELATAN politik lima tahunan merupakan simplikasi demokratisasi dalam sebuah negara, atau lebih dikenal sebagai instrumen formil demokrasi. Di dalam arena tersebut mengisyaratkan rotasi kekuasaan yang diyakini sebagai bagian dari representasi kepentingan rakyat.

Kontestasi politik yang tinggal beberapa bulan lagi, tepatnya 14 Februari 2024, telah memacu atmosfer politik semakin terasa bergelombang di antara para kontestan ataupun konfigurasi partai politik (parpol). Parpol diberikan legitimasi konstitusional untuk menjadi institusi rekrutmen jabatan-jabatan kenegaraan termasuk Presiden dan Wakil Presiden.



Orkestrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menjadi potret elektoral bagi parpol pengusung ataupun pendukung dalam rangka meyakinkan rakyat untuk menentukan pilihannya. Parpol dan/atau gabungan parpol dituntut mereka-reka strategi jitu dalam rangka menemukan formulasi pasangan capres-cawapres.

Saling-silang di antara parpol dalam menentukan koalisi untuk memenuhi *presidential threshold* sebagai tiket menuju perhelatan 2024 semakin dinamis. Bahkan, terkesan telah terjadi turbulensi politik hingga dramatisasi penegakan hukum yang terjerembap dalam skema aura pemilihan presiden dan wakil presiden.

The screenshot shows the top part of the E-Paper interface. At the top right, it says 'E-Paper Media Indonesia'. Below that, there's a navigation bar with 'RABU, 4 OKTOBER 2023' and 'FOKUS'. The main headline is 'Dari Tempat Persembunyi Jadi Desa Wisata Religi'. Below the headline, there's a sub-headline: 'DUSUN Krecek, Desa Getas, Kecamatan di daerah perbukitan, sekitar 15 kilome kota di Kabupaten Temanggung, Jawa T'. There are also some smaller text snippets and a small image on the right side of the article preview.

Baca E-Paper

### MI TV

### Operasi Amandel Sebabkan Mati Timbulkan Tanda Tanya

Seorang anak berinisial A, 7, menderita mati i menjalani operasi amandel di rumah sakit ter

Selengkapnya

### Berita Terkini

#### Presiden Instruksikan Bentuk Da EKONOMI

PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan un segera menindaklanjuti pembentukan dana pariwisata atau tourism...

Rabu 04 Oktober 2023, 20:58 WIB

#### OPEC+ Rekomendasikan Pengura agar Harga Minyak Naik

Di tengah tarik ulur pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Oktober ini terdapat atmosfer politik yang menakutkan, yaitu proses pengujian batas minimal usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK). Muncul berbagai pertanyaan publik, adakah kepentingan mendesak sehingga perlu diuji perihal soal batas minimal usia capres dan cawapres itu? Kenapa pengujian dilaksanakan pada saat tahapan pemilu sudah berjalan?

Pasal 169 huruf q UU Nomor 17/2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa syarat menjadi capres dan cawapres ialah berusia paling rendah 40 tahun. Berbagai macam permohonan telah diperiksa dalam persidangan MK dari yang mengajukan permohonan batas usia minimal 21 tahun, 25 tahun, 30 tahun, dan 35 tahun.

Argumentasi atas permohonan pengujian batas minimal usia capres dan cawapres itu dilakukan dengan berbagai perspektif. Sebagai catatan dalam negara demokrasi pergumulan pemikiran ialah hal biasa dan merupakan kewajaran. Bahkan, perbedaan menjadi *magnitude* bagi tegaknya pilar demokrasi sepanjang dalam koridor konstitusi.

Kedudukan MK sebagai *guardian of constitution* menjadi bagian dari mengurai dan meleraikan dinamika argumentasi terkait dengan penafsiran atas konstitusionalitas hak warga negara, yang mempertanyakan kedudukan konstitusi atas norma perundangan yang dianggap berdampak kerugian konstitusional hak-hak fundamental rakyat.

Indonesia pernah menetapkan Perdana Menteri Sutan Syahrir pada usia 36 Tahun. Syahrir diangkat Presiden Soekarno dan ditugaskan menjalankan roda pemerintahan serta bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) atau Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS).

Di banyak negara muncul pemimpin di bawah usia 40 tahun, misalnya Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara berusia 35 tahun. Sanna Marin, Perdana Menteri Finlandia (34 tahun), Perdana Menteri Ukraina Olesksiy Valeriyovych (35 tahun), Pemimpin Selandia Baru Jacinda Ardern (39 tahun), dan Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani dari Emir Qatar (39 tahun).

Bahkan, jika menelaah partisipasi politik dalam kontestasi politik 2024, sekitar 56% pemilih yang terdaftar ialah berusia di bawah 40 tahun sehingga ini juga yang menjadi *magnitude* bagi para pemohon untuk mengajukan *judicial review* ke MK.

Tidak sedikit publik khawatir bahwa permohonan tersebut beririsan dengan kepentingan calon yang pada Oktober 2023 menginjak usia 35 tahun. Namun, terlepas dari itu, jika MK mengabulkan permohonan, setiap orang yang berusia minimal 35 tahun berhak dicalonkan menjadi capres dan cawapres oleh parpol dan/atau gabungan parpol.

Saat ini gairah publik terfokus pada permohonan pengujian syarat batas minimal usia capres dan cawapres karena baru ada satu pasangan capres-cawapres, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Sementara itu, capres lain, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo belum ada pasangan. Karena itu, wajar publik bertanya apakah penetapan cawapres harus menunggu putusan MK, padahal MK dalam pengujian terhadap UU tidak terpakai batas waktu.

Pertanyaan publik dalam momentum kontestasi politik itu menjadi hal menarik. Apalagi Ketua MK Anwar Usman mencontohkan Nabi Muhammad SAW yang mengangkat panglima perang berusia 17 tahun, Muhammad Alfatih melawan

#### EKONOMI

Panel OPEC+ pada Rabu (4/10/2023) merekomendasikan agar kartel minyak tersele mempertahankan strategi...

Rabu 04 Oktober 2023, 20:53 WIB

### Tokoh Agama ASEAN Harus Berk Terhadap Perubahan Iklim

#### HUMANIORA

Menag berharap para pemimpin dan tokoh agama berkontribusi dalam menemukan solusi atas masalah yang mengancam...

Rabu 04 Oktober 2023, 20:48 WIB

### Wakil Camat Gambir Akui masih Sampah di Kawasan Dekat Istan

#### MEGAPOLITAN

Menata kawasan Gambir, Jakarta Pusat, memang memiliki tantangan tersendiri. Pasalnya, wilayah itu diisi...

Rabu 04 Oktober 2023, 20:43 WIB

### PBB tidak Pesimistis Menilai Sur Ekonomi Tiongkok

#### EKONOMI

Kekhawatiran mengenai masalah ekonomi Tiongkok terlalu dilebih-lebihkan dan Beijing masih memiliki banyak...

Rabu 04 Oktober 2023, 20:41 WIB

### Gelar Gladii Resik, Regina Art M Project Siap Taklukan Eropa

#### WEEKEND

Pementasan monolog berjudul Cotton Candy c Besok atau Tidak Sama Sekali di 5 negara Eroj berlangsung mulai...

Rabu 04 Oktober 2023, 20:40 WIB

### Baznas Luncurkan Indeks Zakat

#### HUMANIORA

Indeks Zakat Nasional (IZN) 3.0 tahun 2023 bertujuan untuk mengukur kinerja pengelola zakat di suatu daerah...

Rabu 04 Oktober 2023, 20:35 WIB

### Gakkum KLHK Segel Lahan

#### FOTO

irektorat Jenderal Penegakkan Hukum KLHK menyegel lahan yang masih dalam proses perhitungan luas yang...

Rabu 04 Oktober 2023, 20:30 WIB

Selengkapnya

#### Top Tags

# Pilpres 2024

# Bursa karbon

# Asian Gam

# Film porno

# Brigadir Setyo Herlambang

#### BenihBaik.com

### Lebih dari 1.000 Pelajar Termasi Disabilitas Terima Beasiswa Gra

#### HUMANIORA

Beasiswa GrabScholar 2023 diberikan kepada 1.158 pelajar SD, SMP, SMA/SMK, hingga S1/D4 dari 138...

Senin 02 Oktober 2023, 16:54 WIB

### Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 1 Melalui BenihBaik.com

#### HUMANIORA

kekuasaan Bizantium, mendobrak Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul. "Saya tidak menyinggung apa pun putusan. Jangan dikaitkan dulu," kata Anwar Usman.

MK pernah mengabulkan permohonan mengenai batas usia jabatan publik. Di antaranya soal usia pensiun panitera MK, usia pensiun jaksa, dan usia minimal anggota Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, MK juga pernah menolak permohonan pengujian batas usia. Paling tidak delapan putusan menyatakan ditolak dan lima permohonan tidak dapat diterima atau NO (*niet ontvankelijke verklaard*).

## Ujian bagi MK

Eksistensi MK saat ini sedang diuji. Pasal yang dimohonkan oleh pemohon sesungguhnya bukanlah urusan konstitusionalitas, melainkan urusan teknis yang bukan merupakan kewenangan MK untuk menguji dan/atau menafsirnya sehingga MK tidak berwenang mengabulkan permohonan tersebut dengan alasan-alasan di luar konstitusionalitas, kecuali terdapat unsur diskriminasi. Batas usia capres dan cawapres sama sekali tidak terdapat unsur diskriminasi.

Jika MK memutuskan batas usia sebagaimana dimaksud karena berdimensi diskriminatif, lantas apakah 35 tahun dan/atau di bawah 35 tahun tidak berimplikasi mengandung makna diskriminatif? Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa 'Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang'.

Dengan demikian, perumus UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa urusan usia capres dan cawapres merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu Presiden dan DPR sebagai positif *legislation*. Dengan demikian, norma tersebut jelas bukan urusan konstitusionalitas, melainkan urusan pembentuk UU atau *open legal policy*.

Menelaah UUD 1945, terkait dengan usia jabatan-jabatan kenegaraan diserahkan kepada lembaga pembentuk UU. Para perumus UUD 1945 berkeyakinan bahwa batas usia jabatan kenegaraan bersifat dinamis. Jika dirumuskan dalam UUD 1945, akan menjadi statis dan tidak mudah menyesuaikan dengan dinamika perkembangan sosial-politik kenegaraan.

Karakter dinamis juga dapat dilihat dari syarat usia hakim konstitusi semula minimal 47 tahun berubah menjadi 55 tahun, bahkan akan diubah lagi dalam UU MK menjadi 60 tahun. Demikian juga dengan syarat kelembagaan negara lain tidak diatur dalam konstitusi, seperti DPR, DPD, dan DPRD ialah 21 tahun, Komisi Yudisial ialah 40 tahun, hakim agung ialah 45 tahun, dan BPK ialah 35 tahun.

Berbahaya jika konstitusi mengatur syarat minimal dan maksimal usia jabatan kenegaraan karena jika terjadi perkembangan dinamika kenegaraan, harus mengubah konstitusi. Padahal perubahan UUD 1945 berdasarkan Pasal 37 UUD 1945 termasuk dalam kategori *rigid* dan tidak mudah. Konstitusi tidak mengatur hal-hal yang bersifat teknis, bahkan termasuk hal yang bersifat penting, melainkan hanya hal-hal pokok dan mendasar.

Jika MK memutuskan batas usia capres dan cawapres, terkunci sudah dinamika perkembangan ketatanegaraan termasuk dinamika kebangsaan. Memperhatikan perkembangan keterangan DPR dan pemerintah sesungguhnya tersirat bahwa perubahan batas minimal usia capres dan cawapres ialah sebuah kewajaran.

Ulang tahun ini dirayakan salah satunya dengan berbagi makanan sehat penuh nutrisi bagi 17 Panti Asuhan...

Jumat 15 September 2023, 23:11 WIB

## Gerakan Green Movement Sabuk Nusantara Tanam 10 Ribu Pohor

HUMANIORA

Program ini akan dimulai di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU),...

Selasa 12 September 2023, 19:36 WIB

## Komitmen Grab Lindungi Masa 1

HUMANIORA

Setelah tahun lalu menjangkau 1.158 pelajar, kini GrabScholar: Program Beasiswa Grab kembali hadir dan...

Sabtu 22 Juli 2023, 10:31 WIB

## Donasi Pelanggan KFC Biayai Re-Dasar di Tasikmalaya, Jabar

HUMANIORA

PT Fast Food Indonesia Tbk telah menyerahkan donasi tersebut kepada Yayasan Benih Baik yang akan...

Kamis 06 Juli 2023, 16:31 WIB

Selengkapnya

## MG News

### Presiden Instruksikan Bentuk Da

EKONOMI

PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan untuk segera menindaklanjuti pembentukan dana pariwisata atau tourism...

Rabu 04 Oktober 2023, 20:58 WIB

### Jelang Senja, Presiden Gelar Peringatan Mata dengan Menag

POLITIK DAN HUKUM

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas Istana, Rabu sore, 4...

Rabu 04 Oktober 2023, 19:31 WIB

### Kapolri Perintahkan Anggota tida Partai pada Pemilu 2024

POLITIK DAN HUKUM

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan setiap anggota untuk menjaga netralitas dalam masa Pemilu...

Rabu 04 Oktober 2023, 19:09 WIB

### Kasus Bocah Meninggal Seusai O Amandel, Polisi Koordinasi deng

MEGAPOLITAN

Dua lembaga profesi kedokteran dilibatkan dalam mengusut kasus dugaan malapraktik kasus tewasnya bocah seusai...

Rabu 04 Oktober 2023, 16:39 WIB

### Demokrat Masuk Kabinet? Puan: Jokowi

POLITIK DAN HUKUM

KETUA DPP PDIP Puan Maharani merespons kabar Partai Demokrat akan mendapat jatah menteri di Kabinet...

Rabu 04 Oktober 2023, 16:34 WIB

Bagi penulis, batas usia minimal capres dan cawapres bukanlah masalah konstitusionalitas, melainkan merupakan *open legal policy* berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. MK tidak berwenang memutus hal-hal yang bersifat teknis apalagi tidak menyangkut urusan konstitusionalitas. Jika MK memutus, norma batas usia minimal capres dan cawapres menjadi stagnan, dan bahkan bisa menabrak konstitusi.



TAGS: # batas usia capres dan cawapres # Mahkamah Konstitusi # Pilpres 2024

1 comment

## Baca Juga



### Polusi Udara, Kesehatan dan Ketersediaan Layanan Publik

Prof. dr. Muchtaruddin Mansyur, MS, PKK, PGDRM, SpOk, PhD. Professor Bidang Kedokteran Okupasi, Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas, Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia. Rabu 04 Oktober 2023, 07:05 WIB

PM juga menyebabkan kontaminasi lingkungan dengan menempel di permukaan, termasuk badan air, tanah, dan...

### Al-Ma'un Hijau: Ijtihad Menuju Manusia Ekologis

Ridho Al-Hamdi Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah; Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Rabu 04 Oktober 2023, 05:00 WIB

TULISAN ini lahir atas dua kegelisahan pribadi penulis. Kegelisahan pertama ialah fenomena mutakhir tentang perusakan alam dan lingkungan...

### Strategi Hijau untuk Industri Berkelanjutan, Peluang dan Tantangan

Elkana Timotius, Dosen Prodi Teknik Industri Universitas Kristen Krida Wacana (Ukrida) dan Direktur PT Rodalink Indo Tama. Selasa 03 Oktober 2023, 23:00 WIB

LAPORAN Kementerian Perindustrian Republik Indonesia pada September 2023 semakin memperkuat optimisme para pelaku industri manufaktur di...



Selengkapnya

## Berita Populer

### Liga 1 Indonesia, Cek Jadwal dan

SEPAK BOLA

LIGA 1 musim 2023-2024 telah dimulai pada 1 Juli 2023. Berikut hasil skor pertandingan...

Selasa 03 Oktober 2023, 14:15 WIB

### Lengkap! Klasemen Asian Games Hangzhou dan Jadwal Tanding K Indonesia

OLAHRAGA

ASIAN Games ke-19 Hangzhou 2022 diselenggarakan pada 23 September hingga 8 Oktober 2023 di Tiongkok. Berikut...

Rabu 04 Oktober 2023, 15:25 WIB

### Pada Ganjar, Jokowi Titip Kedau Disiapkan

POLITIK DAN HUKUM

PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan dampak perubahan iklim semakin nyata. Kekeringan dan fenomena...

Jumat 29 September 2023, 17:24 WIB

### Delta Dunia Group Catatkan Hasil Semester Pertama 2023

EKONOMI

Selain itu, EBITDA atau arus kas dari aktivitas operasi perusahaan, naik menjadi USD175 jut (Rp2,71...

Sabtu 30 September 2023, 23:41 WIB

### Panda di AS akan Pulang Kampung

INTERNASIONAL

Panda pertama kali datang ke Amerika Serikat pada...

Jumat 29 September 2023, 13:11 WIB

### Efektifkah Bea Masuk Menahan

OPINI

SUDAH sering kita dengar kalau barang dari Tiongkok itu lebih murah harganya dibandingkan produk dalam...

Minggu 01 Oktober 2023, 20:50 WIB

### Panas Ekstrem Dua Tahun Cairkan Gletser Swiss

INTERNASIONAL

Pemanasan ekstrem selama dua tahun berturut-turut di Pegunungan Alpen melenyapkan 10% volume gletser di...

Minggu 01 Oktober 2023, 19:45 WIB

Selengkapnya

## Berita Weekend

### Gelar Gladii Resik, Regina Art M Project Siap Taklukan Eropa

Pementasan monolog berjudul Cotton Candy Besok atau Tidak Sama Sekali di 5 negara Eropa berlangsung mulai...

Rabu 04 Oktober 2023, 20:40 WIB

### Pentingnya Mengajari Anak Kete Mengambil Keputusan Sejak Dini

Setiap manusia harus mengambil keputusan dalam...